

**KOLABORASI STAKEHOLDER DALAM PENGEMBANGAN  
EKOWISATA MANGROVE PANTAI KERTOMULYO KECAMATAN  
TRANGKIL KABUPATEN PATI**

Muhammad Khusnul Khuluqi<sup>1</sup>, Sri Suwitri<sup>2</sup>, Teuku Afrizal<sup>3</sup>

**Departemen Administrasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. H. Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman : <https://fisip.undip.ac.id/> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

---

**ABSTRACT**

*Kertomulyo Beach Ecotourism has a long history and eventually gained advantages over other beaches in Pati Regency. The progress of Kertomulyo Beach Ecotourism has been achieved through collaboration between the government, private sector, and the community, as stated in Regional Regulation No. 2 of 2018 concerning the Pati Regency Tourism Development Plan 2018-2025. The purpose of this study is to identify the stakeholders involved and the collaboration processes occurring at Kertomulyo Beach. The method used is descriptive qualitative. Some of the theories applied include stakeholder mapping matrix vs. interest theory and stakeholder collaboration processes. The subjects of the study were determined using purposive sampling techniques. The research results focus on the study's objectives, yielding two main conclusions. The first conclusion shows that the stakeholders involved are categorized into four groups based on their level of importance and power: crowd, contest setter, subject, and player. No stakeholders were identified in the crowd category. The contest setter stakeholder is the Pati Regency Tourism, Youth, and Sports Agency (DINPORAPAR). The subject category includes traders, the community, village administration, and mass media. Finally, the player category includes PPUP, Tresno Segoro, and Misaja. The second conclusion indicates that overall, the collaboration process at Kertomulyo Beach can be considered good in terms of the transformation of the beach from barren to green, and its official designation as a tourist spot in 2017. However, in terms of tourism, the results are not significant, as evidenced by a decline in visitor numbers and issues in the collaboration process. Recommendations include enhancing collaboration in tourism at Kertomulyo Beach. Other issues, such as synergy between managers and village administration, must be addressed promptly to support sustainable ecotourism. Keywords: Collaboration, Stakeholder, Ecotourism.*

*Key word : Collaboration, Stakeholder, Ecotourism*

## ABSTRAK

Ekowisata Pantai Kertomulyo memiliki sejarah panjang dan pada akhirnya memiliki keunggulan dari pantai lain di Kabupaten Pati. Kemajuan ekowisata Pantai Kertomulyo dicapai melalui kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam Perda No. 2 Tahun 2018 tentang rencana pembangunan pariwisata Kabupaten Pati 2018-2025. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi *stakeholder* yang terlibat dan proses kolaborasi yang terjadi di Pantai Kertomulyo. Kemudian metode yang dipakai adalah deskriptif kualitatif. Beberapa teori yang dipakai adalah teori pemetaan *stakeholder matriks vs interest* dan proses kolaborasi *stakeholder*. Kemudian untuk penentuan subjek penelitian dengan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian berfokus pada tujuan dari penelitian, sehingga diperoleh dua kesimpulan utama. Kesimpulan pertama menunjukkan *stakeholder* yang terlibat dikategorikan menjadi empat berdasarkan tingkat kepentingan dan kekuatan, yaitu *crowd*, *contest setter*, *subject dan player*. Untuk *stakeholder crowd* tidak ditemukan. Pada *stakeholder contest setter* adalah DINPORAPAR Kabupaten Pati. *Subject* meliputi pedagang, masyarakat, pemdes dan media massa. Terakhir kategori *player* meliputi PPUP, Tresno Segoro dan Misaja. Kesimpulan kedua menunjukkan secara keseluruhan proses kolaborasi yang terjadi pada Pantai Kertomulyo dapat dikatakan baik apabila dilihat dari segi perubahan yang terjadi pada kondisi pantai yang awalnya gersang menjadi hijau dan telah menjadi tempat wisata secara resmi ditahun 2017, tetapi dalam hal wisata terlihat tidak signifikan yang didasarkan pada penurunan tingkat pengunjung dan permasalahan dalam kolaborasi. Saran yang dapat diberikan perlu adanya peningkatan kolaborasi dalam hal wisata yang ada di Pantai Kertomulyo. Permasalahan lain seperti sinergitas antara pengelola dan pemdes harus segera dicapai. Sehingga dapat menunjang untuk menjadi ekowisata yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Kolaborasi, *Stakeholder*, Ekowisata

## PENDAHULUAN

Kebutuhan manusia akan rekreasi semakin meningkat seiring perkembangan zaman, menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sarana penting untuk menghilangkan stres dan meningkatkan kualitas hidup. Indonesia, dengan keanekaragaman budaya dan kekayaan alamnya, termasuk garis pantai yang panjang, memiliki potensi besar untuk pengembangan pariwisata, termasuk ekowisata berbasis mangrove. Kabupaten Pati, khususnya Desa Kertomulyo, Kecamatan Trangkil, adalah salah satu contoh daerah dengan potensi ekowisata mangrove yang signifikan. Pantai Kertomulyo telah berkembang menjadi destinasi ekowisata dan memiliki beberapa keunggulan.

Keunggulan pertama adalah dengan peningkatan luas hutan mangrove yang signifikan dari tahun ke tahun dibuktikan dengan data berikut ini :

### **Luas Hutan Mangrove Pantai Kertomulyo**

#### **Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati**

No	Tahun	Luas Mangrove
1.	2017	± 9,99 Ha
2.	2018	± 11,58 Ha
3.	2019	± 13, 99 Ha
4.	2020	± 17, 5 Ha
5.	2021	± 21 Ha

Sumber : Mufidah Esti Walupi 2022  
(diolah)

Banyaknya tanaman mangrove di kawasan pesisir Pantai Kertomulyo dapat dilihat dari data di atas. Pada tahun 2017, luas tanaman mangrove hanya sekitar 9,99 ha. Kemudian pada tahun 2018 diperluas sebesar 15,92% menjadi 11,58 Ha. Selain itu, terjadi peningkatan sebesar 20,8% pada tahun 2019. Hasilnya, luas hutan bakau mencapai 13,99 hektar. Sementara luas mangrove akan bertambah masing-masing sebesar 17,5% dan 25,1% pada tahun 2020. Pada tahun 2021 juga akan meningkat sebesar 20%. Dengan demikian, luas hutan bakau di Pantai Kertomulyo mencapai total 21 ha. Hasilnya, kemajuan yang dicapai sangat positif. karena kawasan tersebut telah berkembang secara signifikan dari tahun ke tahun. Keunggulan kedua adalah memiliki SDM yang mumpuni, sebelum menjadi ekowisata, Pantai Kertomulyo sangat gersang dan minim tumbuhan. Sejumlah SDM di desa mulai memperhatikan dan melakukan upaya sukarela untuk memperbaiki lingkungan pantai, yang akhirnya diresmikan sebagai tempat wisata pada tahun 2017. Pada awalnya, fasilitas di pantai ini sangat minim, hanya ada hutan mangrove kecil dan jembatan berbentuk huruf 'A'. Kemudian, berbagai fasilitas seperti gazebo dan menara kayu ditambahkan untuk memperkaya pengalaman pengunjung dan memperindah

pantai. Jembatan-jembatan juga dibangun untuk memudahkan akses pengunjung dan memberikan kesan lebih dekat dengan hutan mangrove. Tanpa SDM yang peduli dan inisiatif untuk merubah keadaan melalui penanaman mangrove dan pengembangan wisata, Pantai Kertomulyo tidak akan mencapai kondisi seperti saat ini. Keunggulan lainnya adalah Pantai Kertomulyo berhasil menjadi pariwisata berkelanjutan, dibuktikan dengan kemenangan Kabupaten Pati dalam perlombaan perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2021, meraih juara 1 tingkat provinsi. Prestasi ini dicapai melalui berbagai penilaian dan pemenuhan indikator sesuai Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012, seperti penyuluhan sadar wisata, penyediaan sarana akomodasi, pembangunan jalan setapak, serta peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam pengembangan wisata.

Dari hal-hal yang diuraikan dapat dipahami bahwasannya. Sebelum menjadi daerah ekowisata, Pantai Kertomulyo mengalami perjalanan yang panjang dan terjadi kolaborasi dari beberapa *stakeholder* untuk menunjang perkembangan ekowisata Pantai Kertomulyo. Hal itupun senada dengan Peraturan Pemerintah No 50 Tahun

2011 pasal 51-52 tentang induk pembangunan kepariwisataan nasional tahun 2010-2025 dan perda No. 2 Tahun 2018 tentang rencana pembangunan pariwisata Kabupaten Pati 2018-2025. Dalam peraturan tersebut memiliki ketersesuaian, yang pada intinya dijelaskan untuk mencapai pembangunan pariwisata, kekuatan terbesar yang harus diterapkan adalah terciptanya bentuk skema kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Pengembangan ekowisata di Pantai Kertomulyo, Kabupaten Pati, telah menunjukkan potensi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan melalui ekosistem mangrove. Keberhasilan ini dicapai berkat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Meski demikian, masih ada masalah yang memerlukan penelitian lebih lanjut, terutama terkait penurunan kunjungan wisata yang tetap terjadi di Pantai Kertomulyo meskipun tren nasional

menunjukkan peningkatan pasca penurunan akibat *Covid-19*.

### Jumlah Wisatawan Pada Ekowisata

#### Mangrove Pantai Kertomulyo

#### Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati

Nama Objek	2018	2019	2020	2021	2022
Wisata					
Pantai Banyutowo	7.29 0	50.59 6	9.68 1	-	-
Pantai Idola	-	-	9.68 1	7.200	-
<b>Pantai Kertomulyo</b>	-	-	-	<b>52.44 1</b>	<b>43.13 1</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten

Pati 2023 (diolah)

Selama lima tahun terakhir, hanya ada tiga pantai wisata di Pati, menunjukkan pengelolaan yang kurang optimal meskipun memiliki garis pantai yang panjang. Data jumlah pengunjung, khususnya di Pantai Kertomulyo, tidak konsisten. Meskipun resmi diakui sejak 2017, tidak ada catatan pengunjung dari 2018 hingga 2020. Pada 2021, kunjungan meningkat drastis namun kembali menurun pada 2022. Hal ini menunjukkan kemungkinan penurunan kinerja beberapa *stakeholder*, sehingga penelitian ini akan menganalisis kontribusi dan kolaborasi *stakeholder* dalam pengembangan ekowisata mangrove di Pantai Kertomulyo. Tujuan penelitian

adalah memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat kerjasama guna mencapai pengelolaan ekowisata yang berkelanjutan dan optimal.

### TUJUAN

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi *stakeholder* yang terlibat dan menganalisis proses kolaborasi *stakeholder* yang terjadi pada pengembangan ekowisata Pantai Kertomulyo Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati.

### KAJIAN TEORI

#### A. Stakeholder

Stanford Research Institute pertama kali menggunakan istilah “pemangku kepentingan” pada tahun 1963 (Friedman dan Miles, 2006). Menurut Carroll (1991), klasifikasi dan evaluasi konsep kinerja organisasi merupakan tujuan awal dari konsep pemangku kepentingan. Selain itu, Freeman berpendapat bahwa memahami hubungan antara pertemuan dan orang-orang yang berdampak atau terkena dampak suatu asosiasi adalah metode untuk mengevaluasi kelangsungan hidup asosiasi dalam mencapai tujuan (Arrozaaq, 2017).

#### B. Stakeholder Mapping

Menurut (LAN, 2015: 118), pemetaan *stakeholder* merupakan salah satu proses penting dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis. Sebelum

pembahasan yang lebih lanjut tentang apa itu definisi pemetaan *stakeholder*. Lebih lanjut menurut menurut WHO (2007) dalam (LAN, 2015 : 119) pemetaan *stakeholder* adalah teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai kepentingan dari pihak-pihak kunci, kelompok, atau institusi yang dapat mempengaruhi kesuksesan dari sebuah kegiatan.

Menurut Eden and Ackermann (1998 ; 122) dalam Lembaga Administrasi negara (2015), Identifikasi *stakeholder* didasarkan pada kepentingan dan kekuatan masing-masing *stakeholder*. Setelah diketahui kepentingan dan kekuatan (rendah atau tinggi) selanjutnya dikategorikan sebagai berikut :

1. *Contest setter*, merupakan pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh tinggi, tetapi sedikit kepentingan.
2. *Players*, merupakan *stakeholder* yang aktif karena mereka mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap pengembangan suatu proyek/ program,
3. *Subject*, memiliki kepentingan yang tinggi dan pengaruhnya rendah, walaupun mereka mendukung kegiatan, kapasitasnya terhadap dampak mungkin tidak ada. Namun mereka dapat menjadi pengaruh jika membentuk aliansi dengan *stakeholder* lainnya, dan

4. *Crowd*, merupakan *stakeholder* yang memiliki sedikit kepentingan dan pengaruh terhadap hasil yang diinginkan dan hal ini menjadi pertimbangan untuk mengikut sertakannya dalam pengambilan keputusan.

### C. Collaborative Governance

Pada awalnya, muncul dalam pandangan dunia administrasi dan sejalan dengan kemajuan dalam inovasi dan SDM yang membuat otoritas publik menghadapi permasalahan kompleks yang tidak dapat ditangani sendiri oleh otoritas publik tanpa melibatkan mitra atau penghibur di luar otoritas publik. *Collaborative governance* merupakan sebuah metode dalam penyusunan kebijakan publik dan manajemen publik yang melibatkan aktor-aktor dari luar pemerintahan, seperti tokoh masyarakat, pelaku bisnis, akademisi, LSM, dan organisasi non-pemerintah lainnya, untuk bersama-sama mengelola kepentingan public (Emerson & Nabatchi, 2015 dalam Muhammad Noor, 2022 : 45). Lebih lanjut Model *Collaborative Governance Regime* (CGR) yang dikembangkan oleh Stephan Balogh, Tina Nabatchi, dan Kirk Emerson adalah salah satunya. Meskipun model CGR dianggap sederhana, namun model ini memberikan analisis mendalam mengenai proses kolaborasi, mulai dari masukan hingga pemicu dampak. Mulai dari konteks sistem

dan pendorong hingga kolaborasi dinamis, tindakan, dampak, dan adaptasi, kerangka CGR mengintegrasikan banyak komponen tata kelola kolaboratif. Menurut model CGR, proses kolaborasi antar aktor yang terlibat (*stakeholder*), baik pemerintah maupun non-pemerintah, perlu mengacu pada kerjasama jangka panjang. Menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), proses kolaborasi terdiri dari tiga komponen: (1) dinamika kolaborasi; (2) tindakan kolaborasi; dan (3) dampak dan adaptasi terhadap proses kolaborasi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian kualitatif deskriptif menjadi fokus penelitian. Fokus metode penelitian kualitatif adalah pada observasi dan wawancara mendalam. Dalam metodologi subjektif ini, informasi diperoleh dari berbagai sumber untuk menyelidiki kebenaran data tertentu dari berbagai teknik dan sumber pengamanan informasi. Teknik sampling yang dipakai adalah *purposive sampling*. Dengan tujuan data yang terkumpul bersifat spesifik mendalam dari informan, yang benar-benar terlibat dalam pengembangan ekowisata Pantai Kertomulyo.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Identifikasi *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan ekowisata**

*Stakeholder* merupakan individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau dapat dipengaruhi oleh hasil dari suatu proyek, kebijakan, atau keputusan tertentu. Mereka dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses dan hasil dari suatu inisiatif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk mengidentifikasi *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan ekowisata mangrove Pantai Kertomulyo. Peneliti memakai teori teknik *Stakeholder Mapping (Power Vs Interest)* oleh Eden dan Ackerman. Power serta interest menjadi fokus utama dalam teknik analisis model identifikasi *stakeholder*. Secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Power bisa berasal dari potensi *stakeholder* untuk mempengaruhi kebijakan atau organisasi yang berasal dari kekuasaan berbasis kedudukan atau sumber daya mereka dalam organisasi, atau mungkin pengaruh mereka yang berasal dari kredibilitas mereka sebagai pemimpin atau ahli.
- b. Sedangkan interest *stakeholder* terhadap sebuah kebijakan atau proyek tertentu akan diukur melalui tingkat keaktifannya.

Hasil menunjukkan ada beberapa *stakeholder* yang teridentifikasi dalam pengembangan ekowisata Pantai Kertomulyo yaitu sebagai berikut :

No	Stakeholder	Kepentingan / Interest	Kekuatan / Power	Kategori
1	Pedagog	Tinggi	Rendah	<i>Subject</i>
2	Masyarakat	Tinggi	Rendah	<i>Subject</i>
3	Pokdarwis Tresno Segoro	Tinggi	Tinggi	<i>Player</i>
4	Pemdes	Tinggi	Rendah	<i>Subject</i>
5	PPUP	Tinggi	Tinggi	<i>Player</i>
6	DINPO RAPA R Kabupaten Pati	Rendah	Tinggi	<i>Contest Setter</i>
7	PT. Misaja Mitra	Tinggi	Tinggi	<i>Player</i>
8	Media Massa	Tinggi	Rendah	<i>Subject</i>

Sumber : Hasil penelitian diolah (2024)

## **B. Analisis Kolaborasi Stakeholder dalam Pengembangan Ekowisata**

Ekowisata Mangrove Pantai Kertomulyo memiliki beberapa keunggulan tetapi semakin berjalannya waktu ada kemunduran. Salah satunya adalah jumlah kunjungan wisatawan yang menunjukkan penurunan tiap tahunnya. Hal ini perlu diselidiki lebih lanjut. Terus menerapkan teori CGR pada tata kelola. Emerson, Nabatchi, dan Balogh mengusulkan dengan 3 penanda, antara lain sebagai berikut:

## **1. Dinamika Kolaborasi**

Pengalihan pengelolaan Pantai Kertomulyo kepada karang taruna atau pemuda setempat adalah langkah strategis yang memenuhi kebutuhan pengelolaan intensif. Ini menekankan pentingnya peran pemuda dalam pelestarian lingkungan dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Pemdes menyerahkan gerakan penghijauan kepada pemuda karena mereka memiliki lebih banyak waktu dan kemampuan untuk menjalin relasi, sementara pemdes memiliki banyak urusan lain yang harus ditangani. Selain itu dari dinamika kolaborasi terdapat tiga aspek yang meliputi :

### **a. Pergerakan prinsip bersama**

pergerakan prinsip bersama berawal dari keprihatinan masyarakat atas kondisi pantai dan gerakan penghijauan oleh pemerintah desa pada tahun 2009. Karena membutuhkan pengelolaan yang intensif, pengelolaan kemudian diserahkan kepada pemuda desa yang tergabung dalam karang taruna Satya Mulya. Seiring waktu, para pemuda berhasil menarik perhatian masyarakat dan berbagai pihak lainnya,



hingga akhirnya Pantai Kertomulyo berkembang menjadi destinasi pariwisata. Sehingga dapat disimpulkan dalam pergerakan prinsip bersama bagi aktor-aktor yang terlibat. Berasal dari keprihatinan kondisi pantai, kemudian dapat menarik perhatian dari pihak lain untuk ikut peduli dan pada akhirnya lingkungan pantai mulai berubah, serta untuk sekarang menjadi tempat wisata.

#### **b. Motivasi Bersama**

Dalam motivasi bersama terdapat beberapa hal yang menjadi kesimpulan yang meliputi :

##### 1. Kepercayaan bersama

Dalam membangun kepercayaan bersama, PPUP merupakan aktor utama yang melakukannya. Dikarenakan sebagai kelompok atau komunitas lokal dan benar-benar peduli pada lingkungan pantai. Kepercayaan bersama terbangun dari kesaksian terhadap perubahan positif, komitmen jangka panjang, bukti nyata kontribusi, dan komunikasi efektif antara berbagai pemangku kepentingan.

##### 2. Pemahaman bersama

Secara keseluruhan pemahaman bersama pada *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan ekowisata mangrove Pantai Kertomulyo. Muncul setelah adanya aksi serius dari PPUP sebagai penggerak dalam melakukan penghijauan.

##### 3. Legitimasi internal

Dapat diketahui legitimasi internal terbentuk karena padanya pengakuan pengembangan ekowisata di Pantai Kertomulyo sangat mengandalkan kolaborasi dan dukungan dari berbagai aktor. Pedagang, masyarakat, kelompok lingkungan, pemerintah desa, dinas terkait, dan perusahaan seperti PT Misaja Mitra semuanya memiliki peran penting. Ketergantungan ini membentuk jaringan interaksi yang kompleks namun sangat penting untuk mencapai tujuan bersama dalam pelestarian lingkungan dan pengembangan ekonomi lokal.

#### **c. Kapasitas melakukan tindakan bersama**

Dalam hal kapasitas berdasarkan hasil penelitian terdapat tiga hal yang disoroti, yang meliputi :

1. Kepemimpinan

Pemimpin di Pantai Kertomulyo mengarah pada pengelola yaitu PPUP dan Pokdarwis Tresno Segoro. Dalam melakukan kepemimpinan dalam hal pengembangan ekowisata. Khususnya terkait dengan ekosistem sudah sangat baik, karena menunjukkan perubahan yang signifikan. Akan tetapi untuk kepemimpinan dalam hal wisata masih dirasa kurang, karena dari aspek utama yaitu pengunjung mengalami penurunan.

2. prosedur dan kesepakatan institusi

Hal-hal yang disepakati *stakeholder* mengacu pada arahan pengelola dan kebanyakan memang dalam hal penanaman. Terkait dengan wisata belum ada kesepakatan yang begitu berarti. Karena pada dasarnya dari pihak pengelola memang lebih mengutamakan keberlangsungan ekosistem di

pantai. Adapun wisata yang terbentuk hanyalah sebagai bonus, sebagai dampak positif Gerakan penghijauan yang telah dilakukan sejak lama.

3. Pengetahuan

Secara keseluruhan *stakeholder* yang terlibat telah mengetahui tentang arti dari ekowisata dan pentingnya kolaborasi.

4. sumber daya

Secara keseluruhan dari *stakeholder* yang terlibat. Sudah mampu untuk melakukan perubahan pada keadaan pantai, hingga resmi menjadi tempat wisata pada tahun 2017 tetapi keberlangsungan wisata dari sumber daya dapat dikatakan belum terlalu mendukung.

**2. Tindakan Kolaborasi**

Pada pantai kertomulyo sebelum menjadi ekowisata, mengalami perjalanan panjang. Fokus utama dalam pengembangan pertama kali adalah perbaikan pantai Kertomulyo. Yaitu dengan melakukan gerakan penghijauan dan dilakukan oleh banyak pihak. Kemudian pada tahun

2017 setelah ada SK dari DINPORAPAR, Pantai Kertomulyo resmi menjadi wisata yang mengutamakan lingkungan alam. Sehingga disebut sebagai ekowisata. Pada tahun itu pula media massa, khususnya pers mulai melakukan tindakan kolaborasi secara tidak langsung. Yaitu melakukan penyebaran informasi tentang keberadaan Pantai Kertomulyo. Setelah itu mulai ada pihak swasta yang masuk dan yang paling menonjol adalah Misaja. Dimana telah melakukan tindakan kolaborasi sejak tahun 2018. Hal-hal yang diberikan sangat bermanfaat, yaitu berupa CSR bibit mangrove dan pembuatan gazebo. Semakin berjalannya waktu terkait dengan wisata di Pantai Kertomulyo mengalami kemunduran. Beberapa factor yang menyebabkannya adalah terjadinya *covid-19*, sinergitas antara pengelola dengan pemdes

periode sekarang kurang baik dan minat dari pengelola untuk mengembangkan pariwisata menurun. Tetapi walaupun demikian kerja keras dari kolaborasi *stakeholder*. Jika diruntut dari awal hingga sekarang. Tetap ada manfaat, terutama dari segi perubahan Pantai Kertomulyo yang menjadi semakin hijau dan telah menjadi tempat wisata walaupun masih perlu dilakukan berbagai aksi untuk lebih mendukung keberlangsungan wisata di Pantai Kertomulyo. Sehingga diperoleh beberapa bentuk tindakan kolaborasi yang meliputi :

No	Stakeholder	Tindakan kolaborasi
1.	Pemerintah desa dan Masyarakat	Gerakan penghijauan yang pertama kali digagas dan dilakukan pada tahun 2009 bersama beberapa masyarakat yang peduli terhadap lingkungan
2.	Karang taruna desa dan masyarakat lain	Beranjak pada suatu kesamaan yang dibawa oleh beberapa pemuda dan elemen masyarakat yang

		peduli lingkungan. mereka terus melakukan kerja sama atau kolaborasi untuk terus melakukan kegiatan penghijauan di Pantai Kertomulyo. Hingga pada suatu saat di tahun 2014 sepakat membuat paguyuban bernama PPUP
3.	PPUP dan OISCA	OISCA merupakan NGO yang memberikan pengetahuan tentang mangrove dan bagaimana cara mencari dana terkait bibit mangrove. Setelah bekerja sama dengan OISCA PPUP menjadi semakin bersemangat dalam melakukan kegiatan penghijauan. Dibuktikan dengan kehadiran berbagai aktor yang ikut berpartisipasi seperti, koramil, kodim, kapolres, TNI. Adapun komunitas-komunitas seperti cb, mercy, c70 dan lainnya.
4.	Internal PPUP	Membuat jembatan air yang kemudian menjadi awal dikenalnya Pantai Kertomulyo
5.	Pengelola dan media massa	Tindakan kolaborasi yang terjadi adalah melakukan branding tentang eksistensi keberadaan

		ekowisata. Salah satunya dilakukan oleh redaksi times Indonesia
6.	PPUP dan DINPORAPAR	Pada tahun 2017 diantara PPUP dan DINPORAPAR. Sepakat untuk membuat kelompok sadar wisata. Sehingga lahirlah Pokdarwis Tresno Segoro. Dengan SK Pokdarwis 20 Juni 2017 tetapi tidak menghilangkan eksistensi PPUP itu sendiri.
7.	Pokdarwis Tresno Segoro dan pedagang	Tindakan kolaborasi yang dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat. Pedagang sendiri merupakan elemen masyarakat yang memiliki kepentingan untuk berjualan. Sebagai pengelola wisata Tresno Segoro menyediakan toko-toko untuk pedagang dengan sewa yang relatif murah yaitu 21 ribu per-minggu.
8.	Internal Pengelola (PPUP, Tresno Segoro) dan PT. Misaja	Tindakan yang dilakukan adalah melakukan <i>dies natalis</i> . Dengan tujuan merayakan keberhasilan mereka dan para aktor yang terlibat dalam pengembangan ekowisata Pantai kertomulyo
9.	Pengelola (PPUP, Tresno	Kerjasama yang dilakukan adalah berkaitan dengan

	Segoro) dan PT. Misaja	pemberian CSR berupa bibit di tahun 2018-2021. Selain itu juga CSR berupa pembuatan gazebo.
--	------------------------	---

Sumber : Hasil penelitian 2024 (diolah)

Lebih lanjut, dalam melakukan penelitian di Pantai Kertomulyo, peneliti menemukan fakta bahwasannya memang sangat sepi pengunjung. Berdasarkan data pengunjung di Pantai Kertomulyo mengalami kemunduran dalam dua tahun terakhir. Dibuktikan dengan data berikut :

No	Tahun	Pengunjung
1	2021	52.441
2.	2022	43.131
3.	2023	37.703

Sumber : Arsip DINPORAPAR 2023(Diolah)

Data menunjukkan penurunan pengunjung yang signifikan, dari 52.441 pengunjung pada tahun 2021 menjadi 37.703 pengunjung pada tahun 2023. Penambahan daya dukung wisata, seperti gazebo, ternyata kurang signifikan dalam meningkatkan jumlah pengunjung. Akses menuju lokasi wisata ternyata menjadi faktor penting. Meskipun akses ke ekowisata mangrove Pantai Kertomulyo relatif mudah, jalan menuju lokasi masih sempit dan beberapa bagiannya rusak parah.

### Kondisi Jalan Menuju Ekowisata



Sumber : Dokumentasi penulis (2024)

Terkait dengan jalan yang rusak belum ada suatu Tindakan kolaborasi yang dilakukan. Hal tersebut karena membutuhkan dana yang besar dan untuk hal tersebut sebenarnya bisa dilakukan oleh pemdes. karena pemdes sendiri memiliki anggaran dana desa dari pusat yang jumlahnya sangat besar. Akan tetapi diantara pengelola dan pemdes periode sekarang hubungan mereka renggang, dikarenakan masalah sinergitas.

Beberapa *stakeholder* mengalami penurunan performa, terutama pemerintah desa yang awalnya berperan penting dalam pengembangan awal ekowisata mangrove Pantai Kertomulyo. Seiring waktu, kekuatan pemerintah desa melemah karena masalah sinergitas dengan pengelola. Pengelola utama, yaitu PPUP dan Tresno Segoro, juga mengalami penurunan performa karena tidak dapat menjalin

hubungan baik dengan pemerintah desa dan gagal membangkitkan ekowisata dari tren penurunan pengunjung, seperti yang terlihat pada temuan tahun 2023. DINPORAPAR, sebagai organisasi publik, telah membantu dalam branding ekowisata, namun perannya masih kurang efektif dalam menunjang keberlanjutan ekowisata. Meskipun memiliki kekuatan yang signifikan, kepentingan DINPORAPAR masih rendah, sehingga tidak dapat berbuat banyak terhadap penurunan jumlah pengunjung.

### **3. Dampak**

Berkaitan dengan dampak dapat dikategorikan menjadi tiga dampak utama yang meliputi:

- a. Dampak yang diinginkan meliputi, perubahan signifikan pada Pantai Kertomulyo dan kemudahan dalam mencari bibit mangrove.
- b. Dampak Yang tidak diinginkan, pada dampak ini yang terlihat sangat jelas adalah sinergitas dari pengelola dan pemdes yang menjadi kurang baik.

- c. Dampak tidak terduga meliputi, terjadinya *covid-19* yang mempengaruhi keberlangsungan wisata. Kemudian dampak yang lain adalah lahirnya UMKM yang memanfaatkan hasil mangrove sebagai bahan produksi.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Untuk *stakeholder* yang terlibat dikategorikan menjadi empat berdasarkan tingkat kepentingan dan kekuatan, yaitu Crowd, contest setter, subject dan player. Untuk *stakeholder crowd* tidak ditemukan. Pada *stakeholder contest setter* adalah DINPORAPAR Kabupaten Pati. Kemudian Subject meliputi pedagang, masyarakat, pemdes dan media massa. Terakhir kategori *player* meliputi PPUP, Tresno Segoro dan Misaja.
2. Secara keseluruhan proses kolaborasi yang terjadi pada Pantai Kertomulyo dapat dikatakan baik apabila dilihat dari segi perubahan yang terjadi pada

kondisi pantai yang awalnya gersang menjadi hijau dan telah menjadi tempat wisata secara resmi ditahun 2017. Kemudian pada tahun 2021 ikut menyongsong Kabupaten Pati dan mendapat nominasi. Akan tetapi dalam hal wisata menunjukkan hal yang kurang signifikan yang didasarkan pada penurunan tingkat pengunjung

## **B. Saran**

1. Kolaborasi dalam ekowisata mangrove Pantai Kertomulyo perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek pariwisata. Meskipun ekosistem dan daya tarik wisata sudah memadai, kolaborasi yang lebih komprehensif diperlukan. Peneliti merekomendasikan pembuatan program bersama karena sebagian besar *stakeholder*, selain pengelola, hanya berfokus pada penanaman. Hanya tiga aktor yang berkontribusi signifikan dalam pengembangan wisata meliputi PPUP, Pokdarwis Tresno Segoro, dan Misaja.
2. Pengelola dan pemdes harus segera bersinergi. Tingginya ego dari kedua pihak menghambat pengembangan. Sinergi antara pengelola dan pemdes

dapat memberikan dampak signifikan pada wisata Pantai Kertomulyo, termasuk perbaikan akses jalan yang vital untuk pariwisata.

3. DINPORAPAR memiliki kekuatan besar dalam pengembangan ekowisata tetapi kepentingannya cenderung rendah. Saat ini, peran DINPORAPAR hanya sebatas pembina dan evaluator teknis. Akan lebih baik jika DINPORAPAR meningkatkan kepentingannya dan menunjukkan tanggung jawab nyata dalam memajukan pariwisata Pantai Kertomulyo, mengingat jumlah pengunjung yang menurun.
4. Peneliti menyadari penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dan dijadikan referensi untuk penelitian lanjutan yang menganalisis kolaborasi *stakeholder*.

## **Daftar Pustaka**

- ADHARANI, Y., Zamil, Y. S., Astriani, N., & Afifah, S. S. (2020). Penerapan Konsep Ekowisata Di Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 179. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.25235>
- Alfiandri, A., Salomo, R. V., Prasajo, E., & Wicaksono, A. (2022). Collaborative Governance Model for Mangrove

- Ecotourism: Bintan Island Case, Indonesia. *ResearchSquare*, 1–26. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2393040>
- Ardiansyah, I. (2021). Analisis *Stakeholder* dalam Pengembangan Ekowisata di Taman Wisata Alam Gunung Pancar Kabupaten Bogor Imam Ardiansyah Program Studi Hospitality dan Pariwisata, Universitas Bunda Mulia, Jakarta, Indonesia Email: [iardiansyah@bundamulia.ac.id](mailto:iardiansyah@bundamulia.ac.id) Abstract In. *Jurnal EDUTURISMA*, VI(November), 1–8.
- Arrozaaq, D. L. C. (2016). Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar *Stakeholders* Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3, 1–13. <http://repository.unair.ac.id/67685/>
- Asriani, I., Sudarsono, B., & Wahyuddin, Y. (2021). Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Mangrovedan Tambak Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (Studi Kasus: Kab. Pati). *Jurnal Geodesi Undip*, 10(1), 241–249.
- Astuti, R.S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). Sampul Collaborative Governance. *Collaborative Govenance Dalam Perspekit Publik*, 161.
- Asyifa, N. (2025). *PENGEMBANGAN DESTINASI EKOWISATA*.
- Bakhtiar, N. F. (2022). *Arahan Pengembangan Ekowisata Mangrove Kampung Baru, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara*. <http://repository.itk.ac.id/17851/>
- Bangun, T. F. B. (2020). Analisis Kemampuan Siswa dalam Menentukan Amanat dan Penokohan dalam Cerita Pendek Pada Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas V SD Negeri 064020 Medan Sunggal TA 2020/2021. <http://portaluniversitasquality.ac.id:5555/1297/>
- BAPPEDA Kabupaten Pati. (2022). *15\_\_PERBUP\_NO\_15\_TAHUN\_2022\_TENTANG\_RPD\_KAB\_\_PATI\_TAHUN\_2023-2026.pdf*. [https://jdih.patikab.go.id/asset/files/15\\_\\_PERBUP\\_NO\\_15\\_TAHUN\\_2022\\_TENTANG\\_RPD\\_KAB\\_\\_PATI\\_TAHUN\\_2023-2026.pdf](https://jdih.patikab.go.id/asset/files/15__PERBUP_NO_15_TAHUN_2022_TENTANG_RPD_KAB__PATI_TAHUN_2023-2026.pdf)
- Basrowi & Suwandi. (2014). dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. *Metode Penelitian Kualitatif*, 1(1), 32. <http://e-journal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.iosrjournals.org>
- BPS Kabupaten Pati. (2023). Kabupaten Pati dalam Angka 2023. *Patikab.Bps.Go.Id*, xxiv + 330 halaman. <https://patikab.bps.go.id/publication/2019/08/16/8b050d98d8a8d3a7a96f1c81/kabupaten-pati-dalam-angka-2019.html>
- Choirul Ramadhan, Ari Subowo, M. M. (2021). Kolaborasi Antar *Stakeholder* Dalam Pengembangan Pariwisata Pada Desa Wisata Kandri Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 11(4). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/35857/27645>
- Daniel, Y., Santie, A., Mamonto, F. H., Lasut, M., & Mesra, R. (2023). Penerapan Gaya Kepemimpinan Egaliter Orang Minahasa di Universitas Negeri Manado. 9(1), 549–556. <https://doi.org/10.58258/jime.v9i1.4696/http>



- Darmanto. (2023). *Tata Kelola Birokrasi* (E. Saleha, Ed.). CV. SATYA MANDIRI.  
[https://repository.ut.ac.id/10545/1/2023\\_Tata Kelola Birokrasi.pdf](https://repository.ut.ac.id/10545/1/2023_Tata%20Kelola%20Birokrasi.pdf)
- Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. (2022). draft Buku Statistik Pariwisata Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2022. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(August), 79.  
[https://disporapar.jatengprov.go.id/content/files/DRAFT BUKU STATISTIK - JAWA TENGAH DALAM ANGKA 2022-1674194591.pdf](https://disporapar.jatengprov.go.id/content/files/DRAFT%20BUKU%20STATISTIK%20-%20JAWA%20TENGAH%20DALAM%20ANGKA%202022-1674194591.pdf)
- Ekosafitri, K. H., Rustiadi, E., & Yulianda, F. (2017). Pengembangan Wilayah Pesisir Pantai Utara Jawa Tengah Berdasarkan Infrastruktur Daerah: Studi Kasus Kabupaten Jepara. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 1(2), 145.  
<https://doi.org/10.29244/jp2wd.2017.1.2.145-157>
- Harsono, H. (2021). Analisis Pengaruh Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Potensi Wisata Desa Pucung. *Jurnal Atma Inovasia*, 1(3), 241–247.  
<https://doi.org/10.24002/jai.v1i3.3953>
- Hasnawati, Sapiri, M., & Ruslan, M. (2021). *Gaya kepemimpinan dan peningkatan kinerja* (H. Halim, Ed.). Pusaka Almaida.
- Hidayah, N. A., Hutagalung, S. S., Hermawan, D., Ilmu, F., Lampung, U., Februari, D., April, D., Juni, D., & Pringsewu, K. (2019). *Jurnal Administrasi Publik Analisis Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Wisata Talang Air Peninggalan Kolonial Belanda Di Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu Peran stakeholder dibutuhkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan termasuk pembangun.* 7, 55–71.
- I Gede Eko Putra Sri Sentanu, Ardian Prabowo, Klara Kumalasari, Aulia Puspaning Galih, R. E. W. (2021). Stakeholder Collaboration Model for Ecotourism Development: A Case Study from Batu City, East Java Province. *Journal of Government and Civil Society*, 5(2), 214–236.  
<https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jgs/article/view/4420>
- Irene, N., & Sitorus, B. (2020). *PERAN DAN KOLABORASI STAKEHOLDER PARIWISATA DALAM DI KAWASAN DANAU TOBA [ Role And Collaboration Of Tourism Stakeholders In Supporting Increased Tourism Visits In The Lake Toba Area ]*. 6(2), 83–92.
- Januari, N., Saputra, E. P., Riau, U., Kampus, A., Bina, K., Km, W., Baru, S., Tampan, K., & Pekanbaru, K. (2024). Kolaborasi Pengembangan Pariwisata Pacu Jalur Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi Pacu Jalur adalah Pesta Rakyat kebanggaan Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi . Perlombaan yang konon sudah ada sejak tahun 1903 ini menjadi agenda tetap Peme. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora (JURRISH)*, 3(1).  
<https://prin.or.id/index.php/JURRISH/article/view/2242>
- LAN. (2015). Modul Pelatihan Analisis Kebijakan. *Pusaka Lembaga Administrasi Negara RI*, 11,12,15,54,186, 187,188.
- Mohamad Mirza, S. A. and F. M. (2022). *STRATEGI PENGELOLAAN WISATA MANGROVE BERBASIS DAYA DUKUNG DI PESISIR TAPAK KECAMATAN TUGUREJO SEMARANG [UNDIP]*.

- <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/11788/>
- Moreta, A., & Harirah MS, Z. (2023). Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan pada Tahun 2021-2022. *Journal of Social and Policy Issues*, 3, 106–112. <https://doi.org/10.58835/jspi.v3i3.180>
- Muhammad Noor, F. S. dan A. M. (2022). *COLLABORATIVE GOVERNANCE Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (1st ed.). Harfacreative. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1>
- Nuh, M., Mawardi, M. K., Parmawati, R., & Abdillah, Y. (2024). Collaborative Governance Model In Sustainable Village Tourism Development (Case Study: Kemiren Village Tourism In Ijen Crater Geopark Cultural Site). *Quality - Access to Success*, 25(199), 310–318. <https://doi.org/10.47750/QAS/25.199.34>
- Prabowo, G. E. (2020). PARTISIPASI MASYRAKAT DALAM PENGEMBANGAN WISATA HUTAN MANGROVE GRINTING KABUPATEN BREBES [UNNES]. In *Satukan Tekad Menuju Indonesia Sehat*. <https://lib.unnes.ac.id/42676/>
- Purba, G. P., Yuniningsih, T., & Dwimawanti, I. H. (2012). Model Jaringan Aktor Dalam Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(2), 209–183.
- Rohmania, K., Juni, S., & Astuti, W. (2022). Analisis Peran Aktor Penta Helix Dalam Pengembangan Wisata Taman Anggrek Sememi Ex Lokalisasi Moroseneng Kota Surabaya. *Journal Of Gender Equality And Social Inclusion (Gesi)*, 1(1), 69.
- Roihanah, D. O., & Sunarti. (2017). Pengaruh Leisure Benefit Terhadap Kepuasan Pengunjung (Survey Pada Pengunjung Hawaii Waterpark Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 50(3), 90–99.
- SANDRA DEWI, S.E., M.M, N. (2020). Teori Motivasi. *Pengantar Manajemen (Teori Dan Konsep)*, 5(3), 117–118.
- Saputra, A. N., Utami, N. fiqih, Aziz Rahimallah, M. T., Citra, C., Fariaty, F., & Amiruddin, A. (2023). Collaborative Governance dalam Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Studia Administrasi*, 5(1), 1–9. <https://doi.org/10.47995/jian.v5i1.85>
- Saputra Napitupulu, F., Subowo, A., Afrizal, T., Profesor, J., & Soedarto, H. (2020). *Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang*.
- Septiani, Y., Arribe, E., & Diansyah, R. (2020). ( *Studi Kasus : Mahasiswa Universitas Abdurrah Pekanbaru* ). 3(1), 131–143.
- Toyib, H., Ndraha, A. B., & Telaumbanua, Y. (2022). *KOLABORASI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENCAPAIAN TARGET DAN SASARAN KINERJA LKPJ PADA DINAS KETAHANAN PANGAN , PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN NIAS COLLABORATIVE OF HUMAN RESOURCES IN ACHIEVING LKPJ*

*TARGETS AND PERFORMANCE GOALS AT DINAS KETAHANAN PANGAN. 10(4), 1508–1516.*

- Umar, A., Burhanuddin, B., & Nasrulhaq, N. (2019). Kolaborasi Aktor dalam Pembangunan Pariwisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. *Matra Pembaruan*, 3(1), 57–66. <https://doi.org/10.21787/mp.3.1.2019.57-66>
- Waziz, K. (2020). Komunikasi Massa Kajian Teoritis dan Empiris. In *Jurnal Ilmu Pendidikan* (Vol. 7, Issue 2).
- Yuningsih, T., Darmi, T., & Sulandari, S. (2019). Model Pentahelik Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kota Semarang. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(2), 84. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v3n2.p84-93>